

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021

PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB





KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji Syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Aksi Kinerja Pengadilam Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun 2021.

Penyusunan Rencana Aksi Kinerja merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta pelaksanaan dari Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap kementrian lembaga dan satuan kerja mandiri wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok fungsi serta pengelolaan sumber dayanya dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan.

Penetapan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB ini adalah sebagai tindak lanjut dan pelaksanaan dari Rencana Kinerja Tahun 2021 untuk pencapaian kinerja tahun 2021 sesuai dengan target dan sebagai tolok ukur kinerja untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun 2021.

Dalam menetapkan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB ini berpedoman pada Blue Print atau Cetak Biru Mahkamah Agung tahun 2010-2035, Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB 2015-2019 dan pencapaian kinerja tahun 2020.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB ini, semoga kita semua dapat bekerjasama dalam melaksanakan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021 tersebut untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021 dengan baik.

Pekalongan, 4 Januari 2021

KETUA PENGADICAN NEGERI PEKALONGAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB merupakan salah satu unit organisasi peradilan di bawah Mahkamah Agung RI yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan hukum di wilayah hukum Kota Pekalongan yang terdiri dari 4 Kecamatan, 46 desa/kelurahan dan wilayah hukum Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari 19 Kecamatan, 282 desa/keluarahan.

Hukum yang dilakukan Penegakan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas ΙB tidak dapat terlepas dari birokrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).

Sebagai pelaksana Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Mempunyai visi yaitu : "Terwujudnya Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB yang Agung".

Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB sebagai pelaksana Pelayan
Publik dalam hal Pelayanan dan Penegakan Hukum
berkewajiban mempertanggungjawabkan kinerja kepada publik.

Agar pelaksanaan pelayanan publik dapat terukur dengan baik, Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan yang akan dijadikan sebagai acuan dalam menilai kinerjanya dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalan 1 (satu) tahun.

Selain itu, Rencana Aksi Kinerja merupakan alat manajemen yang dibutuhkan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB untuk dapat Melaksanakan kinerjanya sehingga dapat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah menyusun Rencana Aksi Kinerja tahun 20120 ini sebagai tolok ukur keberhasilan kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sabagai Pengadilan Negeri Tingkat Pertama.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB tahun 2021 ini adalah sebagai dasar atau pedoman dalam melaksanakan pekerjaan pada tahun 2021 yakni sebagai tolok ukur kinerja untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB pada Tahun 2021.

BAB II

RENCANA AKSI KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB 2020-2024 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai pedoman untuk membuat perencanaan jangka pendek yang dibuat setiap tahun anggaran.

Untuk merealisasikan tahapan perencanaan lima tahunan tersebut,
Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah menyusun Rencana Aksi
Kinerja Tahun 2021 sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun 2021 ini telah diupayakan seiring dan sejalan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI yang Berpedoman pada cetak biru (blue print) tahun 2010 -2035. Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun 2021 ini sebagai tonggak awal Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB dalam membangun sebuah sistem pelayanan berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Alur Kinerja yang telah dibangun, hal ini dioptimalkan dan sebagai upaya perbaikan secara kontinyu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi.

Adapun Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB adalah sebagaimana yang tergambar dalam matriks sebagai berikut :

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021 PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	TRIWULAN				Penanggung
				ı	II	Ш	IV	Jawab
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	50	25	25	0	Panitera
		b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	0	0	0	Panitera
		c. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90	20	25	25	20	Panitera
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	20	25	25	20	Panitera
		e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95	25	25	20	25	Panitera
		f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	97	25	25	22	25	Panitera
		g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99	25	25	24	25	Panitera
		h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	2	0	0	2	0	Panitera
		i. Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	20	20	20	20	Panitera
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	25	25	25	25	Panitera
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	25	25	25	25	Panitera

		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2	0	1	1	0	Panitera
		d. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	80	20	20	20	20	Panitera
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	25	25	25	25	Panitera
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	25	25	25	25	Panitera
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	25	25	25	25	Panitera
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1	0	0	1	0	Panitera

KETUA KETUA